

Analisis Praktik Klientelisme dan Faktor yang Memengaruhinya dalam Pemilihan Kepala Desa

Putri Aulia

Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author's e-mail : putriiaulia17@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1467 - 1477

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3291>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3291>

Article History:

Received: 08-07-2026

Revised: 01-08-2026

Accepted: 02-08-2026

Abstract : Village head elections (Pilkades) should ideally follow programmatic logic, yet in practice they are often characterized by personal and transactional clientelism. This study analyzes the forms of clientelism and the factors shaping it in a Pilkades in Simeulue Regency, Aceh, involving informants such as the elected village head, campaign team members, hamlet heads, village officials, the Village Consultative Council (BPD), and voters. Employing a qualitative case study approach, the analysis draws on Hicken's (2011) four elements of clientelism and Aspinall and Berenschot's (2020) framework on brokerage and decentralization in Indonesia's patronage democracy. Findings reveal that clientelism operates systemically through dyadic relationships rooted in kinship, economic dependence, and organizational proximity; contingent exchanges manifested in implicit vote-buying, selective social assistance, and job promises; hierarchy legitimized by kinship ties and incumbency status; and sustained relations before and after the election. The study offers a conceptual contribution by proposing the "community-based broker" an actor whose mobilization effectiveness derives from pre-existing communal authority rather than formal campaign assignments. This practice is reinforced by village-level decentralization, the role of community brokers, and the community's economic dependence on the patron.

Keywords : clientelism, village head elections, community-based brokers, patronage, decentralization

Abstrak : Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) idealnya berlangsung dalam logika programatik, namun dalam praktiknya sering diwarnai klientelisme yang bersifat personal dan transaksional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk praktik klientelisme dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam Pilkades di salah satu desa di Kabupaten Simeulue, Aceh, dengan informan meliputi kepala desa terpilih, tim sukses, kepala dusun, perangkat desa, BPD, dan masyarakat pemilih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan kerangka teoritis Hicken (2011) mengenai empat elemen klientelisme, diperkuat perspektif Aspinall dan Berenschot (2020) tentang peran broker dan desentralisasi dalam demokrasi patronase Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan klientelisme berlangsung sistemik melalui hubungan diadik yang dibangun lewat kekerabatan, ketergantungan ekonomi, dan kedekatan organisasi; pertukaran bersyarat berupa politik uang tersirat, bantuan sosial selektif, dan janji jabatan; hierarki yang dilegitimasi kekerabatan dan status petahana; serta keberlanjutan relasi sebelum dan sesudah pemilihan. Penelitian ini menghasilkan kontribusi konseptual berupa broker berbasis komunitas, yaitu aktor yang efektivitas mobilisasinya bersumber dari otoritas komunal yang telah dimiliki sebelum Pilkades, bukan penugasan kampanye formal. Praktik ini ditopang oleh desentralisasi kewenangan desa, peran broker komunitas, dan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap patron.

Kata Kunci : klientelisme, pilkades, broker berbasis komunitas, patronase, desentralisasi

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan wujud nyata demokrasi pada tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia, lahir dari semangat desentralisasi politik pascareformasi sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kerangka *Global State of Democracy* (GSoD), dimensi representation menilai sejauh mana warga negara memiliki akses yang bebas dan setara terhadap kekuasaan politik melalui pemilu yang kompetitif, inklusif, dan teratur (International IDEA, 2023). Idealnya, Pilkades menjadi ruang kompetisi berbasis program yang mendorong akuntabilitas publik serta relasi politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat desa secara luas. Signifikansi ini semakin nyata mengingat skala fiskal yang menyertainya: pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun Dana Desa pada tahun 2025 untuk sekitar 74.954 desa di Indonesia, dengan kisaran anggaran per desa antara Rp700 juta hingga Rp1,4 miliar guna memajukan perekonomian dan pelayanan publik desa (Kemenkeu, 2019). Dengan demikian, kepala desa terpilih memegang peran krusial dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya publik yang besar tersebut.

Kondisi tata kelola desa saat ini masih jauh dari ideal, meskipun sebagian desa telah menunjukkan kemandirian. Provinsi Aceh, misalnya, tercatat sebagai daerah dengan jumlah desa berkembang terbanyak secara nasional yaitu 3.787 desa, namun data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 masih mencatat 602 desa berstatus tertinggal (GoodStats, 2024). Temuan Bank Dunia memperkuat gambaran ini: hanya 8% desa di Aceh yang meraih skor A dan B+ dalam penilaian *Public Expenditure and Financial Accountability* (PEFA), sementara 37% desa justru meraih skor D+ yang mencerminkan rendahnya efektivitas pengelolaan anggaran (World Bank, 2021). Data tersebut mengindikasikan bahwa tujuan dana desa untuk memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Kesenjangan antara desain kebijakan dan realisasi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal, khususnya proses Pilkades yang menentukan siapa yang akan mengelola sumber daya tersebut.

Munculnya praktik klientelisme dalam Pilkades didorong oleh sejumlah faktor struktural yang saling berkaitan. Kemiskinan dan ketergantungan ekonomi menciptakan kondisi elektoral yang rentan terhadap praktik transaksional, sementara desentralisasi yang tidak diimbangi penguatan institusi menjadikan dana desa berpotensi sebagai sumber daya politik yang dimobilisasi dalam kontestasi (Berenschot, 2018). Berenschot menunjukkan bahwa rendahnya diversifikasi ekonomi suatu daerah, baik akibat ketergantungan pada sumber daya alam maupun pada anggaran negara, justru memperkuat klientelisme karena menekan ruang publik dan melemahkan pengawasan terhadap elite. Kuatnya jaringan kekerabatan turut memperparah kondisi ini, sebab anggota keluarga dekat calon kerap berperan sebagai broker yang mendistribusikan sumber daya kepada pemilih, sementara rendahnya literasi politik menjadikan pemberian material dianggap wajar bahkan menjadi ukuran kelayakan calon. Pada akhirnya, budaya patron-klien yang mengakar menjadikan klientelisme bukan sebagai penyimpangan, melainkan norma politik yang diterima secara sosial dalam kehidupan masyarakat desa.

Secara teoritis, kompetisi elektoral pada tingkat lokal idealnya berlangsung dalam logika programatik, namun berbagai studi menunjukkan bahwa demokrasi elektoral kerap diwarnai praktik klientelisme. Hicken mendefinisikan klientelisme sebagai relasi kuasa antara aktor politik yang memberi (patron) dan pihak yang menerima (klien) atas dasar loyalitas yang bersifat paternalistik, serta menegaskan bahwa relasi ini merupakan transaksi dua arah yang membutuhkan analisis dari sisi penawaran (*supply*) maupun permintaan (*demand*) (Hicken, 2011). Kerangka ini diperluas oleh Aspinall dan Berenschot dalam *Democracy for Sale*, yang menunjukkan bahwa patronase dan peran broker menjadi instrumen penting dalam mempertahankan kekuasaan melalui distribusi sumber daya yang selektif (Aspinall & Hicken, 2020). Berenschot & Aspinall (2020) juga mengembangkan tipologi demokrasi patronase menjadi *party-centred patronage democracy* yang mengandalkan jaringan partai dan sumber daya publik, serta *community-centred patronage democracy* yang bertumpu pada jaringan non-partai informal dan pertukaran transaksional seperti politik uang. Tipologi kedua ini relevan untuk memahami karakter Pilkades yang minim keterlibatan partai politik formal. Variasi antardaerah turut ditegaskan melalui skor Indeks Politik Klientelistik (IPK) yang berkisar antara 4,0 di Surabaya hingga 8,0 di Kupang pada skala 0–10 (Berenschot & Aspinall, 2020), sejalan dengan temuan

Dyzenhaus (2021) di Kenya bahwa pilihan antara kebijakan programatik dan patronase sangat bergantung pada konteks kompetisi politik dan kekuatan otoritas lokal, sehingga relasi negara-warga bersifat hibrida dan tidak semata-mata ditentukan oleh logika patronase.

Skala praktik klientelisme ini juga tergambar dari data kuantitatif berskala nasional. Riset Muhtadi menemukan bahwa sekitar 33% atau 62 juta dari 187 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tahun 2014 terlibat politik uang, dengan angka serupa yaitu 33,1% pada pemilu 2019, yang mengindikasikan bahwa praktik ini bersifat struktural, bukan sekadar anomali (Muhtadi, 2023). Penelitian KITLV Jakarta menambahkan bahwa pada tahun 2014 demokrasi Indonesia berada pada puncak praktik klientelisme, dengan 40% responden meyakini kontrak bisnis besar diberikan kepada pendukung saat kampanye, lebih dari 60% PNS dan tim sukses memperoleh promosi jabatan sebagai balas jasa dukungan politik, bahkan sekitar 60% anggaran pemerintah didistribusikan kepada kelompok pendukung (Mohammad, 2021). Pola serupa ditemukan pada Pilkada, di mana tingginya biaya politik mendorong kepala daerah terpilih melakukan korupsi guna mengembalikan modal, sekaligus melahirkan gaya baru klientelisme berupa jual beli suara yang melibatkan 63,1% pemilih dan patronase birokrasi yang melibatkan ASN (Habibi, 2021). Bardhan (2022) menegaskan bahwa klientelisme melanggar prinsip non-diskriminasi, memberi keuntungan elektoral bagi petahana, mengubah warga dari pemegang hak menjadi pemohon belas kasih, serta menghambat pembentukan birokrasi profesional. Secara spesifik dalam konteks Pilkadaes, Azzahra (2025) menemukan bahwa kompetensi teknis dan rekam jejak formal kandidat tidak selalu menjadi penentu utama kemenangan elektoral, melainkan digantikan oleh kekuatan jaringan relasional dan distribusi sumber daya yang selektif kepada pemilih sasaran.

Fenomena serupa turut teramati dalam praktik Pilkadaes di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, menjelang pelaksanaan Pilkadaes pada 20 Desember 2025 teridentifikasi indikasi distribusi manfaat selektif kepada masyarakat dalam bentuk janji-janji tertentu, dengan pola kampanye *door to door* dan pertemuan warga di setiap dusun sebagai strategi umum para calon. Desa yang menjadi lokus penelitian ini dipilih karena dua pola klientelisme beroperasi secara bersamaan: pertama, klientelisme langsung melalui interaksi personal antara calon dan pemilih; kedua, klientelisme tidak langsung melalui broker politik dari lingkungan keluarga dekat calon yang menjanjikan distribusi bantuan sosial sebagai insentif material. Kedua pola ini mencerminkan apa yang oleh Hicken (2011) serta Berenschot & Aspinall (2020) disebut sebagai *contingent exchange*, yakni relasi pertukaran kepentingan yang mempertukarkan akses jabatan, bantuan sosial, dan sumber daya dengan loyalitas dan suara politik. Menariknya, Aspinall & Hicken (2020) menemukan bahwa jaringan "tim sukses" di Indonesia cenderung bersifat sementara dan transaksional berbeda dengan pola klientelisme relasional yang permanen di Filipina sehingga menimbulkan pertanyaan apakah broker berbasis kekerabatan pada Pilkadaes benar-benar berhenti pasca-kontestasi atau justru mempertahankan relasinya melalui otoritas komunal yang telah dimiliki sebelumnya.

Apabila praktik klientelisme terus berlangsung, dampaknya tidak hanya memengaruhi arah kebijakan dan distribusi sumber daya desa, tetapi juga berisiko melemahkan tata kelola pemerintahan desa melalui logika balas budi, ketika kepala desa terpilih menanggung beban kewajiban sosial kepada para pendukungnya. Urgensi persoalan ini tercermin dari data Kompas yang mencatat 591 putusan kasus korupsi Dana Desa sepanjang 2015–2024, melibatkan 640 terdakwa dengan kerugian negara mencapai Rp598,13 miliar, di mana enam dari sepuluh pelaku adalah kepala desa dan 81,8% pelaku berasal dari perangkat desa (Kompas, 2025b). Secara nasional, 39,84% pelaku korupsi dana desa berasal dari wilayah Sumatera, dengan Aceh, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara sebagai tiga provinsi penyumbang kasus terbanyak (Kompas, 2025a); di tingkat provinsi, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mencatat 31 kasus korupsi pada 2024 dengan kerugian negara Rp56,8 miliar, didominasi oleh unsur ASN dan pemerintahan desa dengan modus penyalahgunaan anggaran (Dialeksis, 2025; Pemerintah Aceh, 2025). Fenomena ini turut terjadi di Kabupaten Simeulue, sebagaimana kasus mantan Kepala Desa Salur Lasengalu yang divonis 2 tahun 6 bulan penjara atas korupsi dana desa sebesar Rp331 juta (AJNN, 2025), menegaskan bahwa persoalan akuntabilitas dan pengawasan dana desa juga nyata terjadi di wilayah penelitian ini. Akar historis persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari jejak panjang

patronase dalam politik Indonesia yang, menurut Kurniawan (2025), telah bertahan sejak era pra-kemerdekaan hingga pasca-Reformasi melalui politik uang, selektivitas distribusi bantuan, dan penyalahgunaan dana publik yang pada akhirnya melemahkan institusi serta mengikis kepercayaan publik.

Sejauh ini, kajian tentang klientelisme lebih banyak membahas pemilu di tingkat nasional dan daerah dengan fokus pada vote buying, distribusi bantuan material, dan peran broker dalam kontestasi elektoral. Pada level Pilkades, studi di Karawang mengungkap bahwa praktik patronase bervariasi menurut tipologi desa dan kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah uang atau barang yang dibagikan, melainkan juga oleh kedekatan personal dan representasi kandidat, sementara kasus kekalahan petahana di Yogyakarta menegaskan bahwa kedekatan personal dan representasi wilayah justru lebih menentukan ketimbang penguasaan sumber daya dan jaringan (Abheseka, 2019). Pada level jaringan broker, Tawakkal et al. (2020) menemukan bahwa rekrutmen calo tidak selalu bersifat transaksional, tetapi juga didorong oleh *solidary benefits* seperti loyalitas komunal dan prestise organisasi, sehingga kerangka transaksional yang dominan dalam literatur dinilai belum lengkap. Meski demikian, kajian yang secara khusus menelaah klientelisme dalam Pilkades masih relatif terbatas, terutama di wilayah kepulauan dan daerah 3T seperti Kabupaten Simeulue, dan sebagian besar penelitian terdahulu berhenti pada deskripsi ada-tidaknya klientelisme tanpa menelaah secara mendalam bentuk operasional serta faktor struktural yang menyebabkan praktik tersebut muncul dan bertahan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui dua kontribusi utama: pertama, menganalisis secara mendalam bentuk praktik klientelisme di tingkat lokal dengan menelaah peran patron, broker, dan klien beserta mekanisme distribusi sumber dayanya; kedua, menghubungkan bentuk praktik tersebut dengan faktor-faktor kontekstual yang menjelaskan mengapa klientelisme dapat terjadi dan bertahan dalam demokrasi desa.

Desa yang menjadi lokasi penelitian ini merepresentasikan kondisi yang relevan untuk dikaji, mengingat Kabupaten Simeulue merupakan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan tingkat kemiskinan mencapai 17,69% (BPS, 2024), kondisi ekonomi masyarakat yang relatif tidak beragam, serta jaringan kekerabatan yang kuat sehingga berpotensi memperkuat relasi patron-klien. Kondisi ini sejalan dengan *constraint perspective* yang diajukan Berenschot (2018), yang menunjukkan bahwa konsentrasi kontrol ekonomi dan ketergantungan pada negara bukan kemiskinan semata mendorong klientelisme karena menekan ruang publik dan pengawasan terhadap elite. Dengan mengangkat kasus ini, penelitian diharapkan memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi patron, broker, dan klien dalam Pilkades sebagai pijakan bagi perbaikan desain kebijakan dan pengawasan demokrasi desa. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun dengan judul "Analisis Praktik Klientelisme dan Faktor yang Memengaruhinya dalam Pilkades."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan menggali secara mendalam makna dan pengalaman sosial subjek penelitian, bukan mengukur atau menggeneralisasi fenomena (Creswell & Poth, 2018; Suharsaputra, 2014). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya mengungkap bentuk-bentuk praktik klientelisme dalam Pilkades, termasuk pola relasi antara patron, broker, dan klien serta mekanisme pertukaran yang menyertainya, dengan berfokus pada satu kasus spesifik agar eksplorasi terhadap konteks sosial, budaya, dan politik setempat dapat dilakukan secara intensif.

Penelitian dilaksanakan di salah satu desa di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis: pertama, Aceh menerima dana Otonomi Khusus sebesar Rp104,232 triliun hingga 2024, namun tingkat kemiskinannya tetap tertinggi di Pulau Sumatera yaitu 12,64%, jauh di atas rata-rata nasional 8,57% (Kemenkeu, 2025; Koran Aceh, 2024), mengindikasikan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya. Kedua, tingginya angka korupsi turut memperburuk kondisi ini, tercermin dari 31 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp56,8 miliar di Aceh sepanjang 2024, yang mayoritas melibatkan ASN dan pemerintahan desa dengan modus penyalahgunaan anggaran

(Dialeksis, 2025; Pemerintah Aceh, 2025). Ketiga, status Kabupaten Simeulue sebagai wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) menjadikannya relevan untuk mengamati bagaimana demokrasi lokal berjalan dalam konteks keterbatasan akses, informasi, dan infrastruktur. Kecamatan Simeulue Timur dipilih karena memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap terbesar di kabupaten tersebut, yaitu 18.381 dari total 65.715 pemilih yang tersebar di 17 desa dan 71 TPS (Tribatanews Polres Simeulue, 2023), sekaligus karakter sosial yang heterogen dan indikasi praktik politik transaksional pada Pilkades sebelumnya. Desa yang menjadi lokus penelitian dipilih karena pernah dipimpin kepala desa lebih dari satu periode sehingga memiliki pengalaman politik lokal yang kuat, serta karena mayoritas warganya bergantung pada bantuan pemerintah yang sering disalurkan melalui elite desa.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode nonprobabilitas yang secara sengaja memilih unit sampel berdasarkan pengetahuan dan relevansinya terhadap tujuan penelitian (Bowling dalam Lewinson 2016). Jumlah informan tidak ditetapkan secara kaku, melainkan mengikuti prinsip kejenuhan data hingga tidak ditemukan tema baru, yang pada akhirnya menghasilkan 14 informan. Informan utama terdiri atas masyarakat pemilih, kepala desa terpilih, dan broker sebagai perantara kandidat, karena keterlibatan langsung mereka dalam dinamika kekuasaan dan pengelolaan dana desa; sementara informan tambahan meliputi ketua pemuda, perangkat desa, kepala dusun, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memberikan perspektif kritis serta konteks administratif dan pengawasan atas jalannya Pilkades. Data dikumpulkan melalui dua sumber sejalan dengan pandangan Moleong bahwa peneliti kualitatif dituntut mencermati kata dan perilaku secara mendetail untuk menangkap makna yang tersirat (Arikunto, 2014): data primer berupa wawancara terstruktur dan observasi langsung terhadap interaksi sosial-politik di desa, guna menggali pola relasi, mekanisme pertukaran, dan keberlanjutan klientelisme sebelum-sesudah Pilkades (Harrison, 2009; Suharsaputra, 2014); serta data sekunder berupa dokumen kepustakaan dan data instansi terkait, termasuk data bantuan sosial dan tindak korupsi pascaterpilih.

Untuk menjaga kerahasiaan identitas informan dan lokasi penelitian sebagaimana disepakati dalam proses perolehan izin, seluruh nama desa, dusun, dan individu dalam artikel ini disamarkan. Informan diberi kode berdasarkan peran atau posisinya dalam struktur sosial desa. Kode KDus merujuk pada Kepala Dusun, dengan penomoran (KDus 1, KDus 3) untuk membedakan dusun yang berbeda. Kode M merujuk pada Masyarakat desa biasa yang tidak memegang jabatan struktural (M1, M2, M3, M4, M5, M6). Sementara itu, informan yang mewakili elemen spesifik ditulis sesuai perannya, seperti Kepala Desa untuk kepala desa terpilih, BPD untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Pemuda untuk ketua organisasi kepemudaan setempat, Perangkat Desa untuk aparatur desa, dan Tim Sukses Kepala Desa untuk anggota tim pemenangan kandidat petahana.

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan menguraikan kondisi dan peristiwa secara sistematis (Arikunto, 2014), dipadukan dengan analisis isi (*content analysis*). Mengikuti tahapan Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono, analisis dimulai sejak studi pendahuluan untuk menajamkan fokus penelitian, dilanjutkan dengan editing, reduksi data, penyajian data secara naratif, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2018). Guna menjamin kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan empat teknik keabsahan data: triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi antar-informan untuk melihat konsistensi dan perbedaan perspektif; triangulasi metode, dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi; member check, dengan mengonfirmasi ulang interpretasi awal kepada informan; serta reflektivitas peneliti, berupa kesadaran kritis terhadap potensi bias selama pengumpulan dan analisis data.

Mengingat sensitivitas topik yang berkaitan dengan praktik politik lokal, penelitian ini menerapkan sejumlah prinsip etis: memperoleh persetujuan informan sebelum pengumpulan data, menjamin kerahasiaan dan anonimitas identitas informan, menjaga netralitas peneliti agar tidak memicu ketegangan sosial antarwarga akibat sensitivitas relasi patron-klien, serta mengamankan seluruh data penelitian untuk kepentingan akademik semata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Praktik Klientelisme dalam Pilkadaes

Praktik klientelisme dalam Pilkadaes di desa lokus penelitian ini bukanlah fenomena sesaat, melainkan suatu sistem relasi sosial-politik yang terbentuk secara berlapis dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan kerangka Hicken (2011) yang mendefinisikan klientelisme sebagai relasi pertukaran yang personal, asimetris, dan berkelanjutan antara patron dan klien melalui jaringan sosial yang telah terbangun jauh sebelum kontestasi elektoral. Dalam konteks ini, patron merujuk pada kepala desa terpilih yang memegang kendali atas distribusi sumber daya lokal; klien adalah masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya tersebut; sementara broker adalah aktor perantara dengan jaringan sosial luas untuk memobilisasi dukungan.

Menariknya, studi ini menemukan bahwa tim sukses yang secara formal berperan sebagai perpanjangan tangan kandidat, dalam praktiknya memiliki fungsi yang identik dengan broker. Meskipun para aktor ini tidak mengakui atau mengenal istilah "broker", kapasitas mereka dalam memobilisasi jaringan sosial personal, menggerakkan massa melalui forum-forum keagamaan, serta menjembatani patron dengan pemilih di akar rumput, mencerminkan fungsi broker sebagaimana dijelaskan oleh Aspinall & Hicken (2020) dalam studi komparatif mereka tentang jaringan klientelisme di Indonesia dan Filipina. Aspinall dan Hicken (2020) menemukan bahwa di Indonesia, jaringan "tim sukses" lebih bersifat sementara dan transaksional, di mana para calo bertindak sebagai "tentara bayaran". Namun, temuan di desa ini menunjukkan nuansa yang berbeda, di mana tim sukses bertumpu pada otoritas sosial dan kedekatan personal yang telah mengakar di masyarakat. Atas dasar ini, studi ini menawarkan konsep broker berbasis komunitas, yaitu aktor yang bekerja melalui otoritas sosial dan kedekatan personal yang telah dimiliki dalam jaringan masyarakat desa, bukan semata-mata melalui mekanisme transaksional. Perbedaan ini tampaknya disebabkan oleh skala politik desa yang lebih kecil dan intim, di mana loyalitas personal lebih dihargai daripada insentif material jangka pendek, berbeda dengan struktur jaringan yang lebih cair pada pemilu di tingkat yang lebih tinggi (Tawakkal et al., 2020).

Untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik tersebut secara sistematis, bagian ini menggunakan empat elemen klientelisme dari Hicken (2011) sebagai dimensi analitik yang saling berkaitan.

1. *Dyadic Relationship* (Hubungan Diadik)

Elemen *dyadic relationship* merupakan relasi personal dan dua arah antara patron dan klien yang telah saling mengenal sebelum pertukaran terjadi. Studi ini mengidentifikasi tiga jalur utama pembentukannya.

Pertama, ikatan kekerabatan menjadi jalur yang paling kuat dan mudah dimobilisasi. Sistem kekerabatan yang sangat erat di desa ini menjadikan loyalitas keluarga sebagai penentu utama arah dukungan elektoral. Hal ini dikonfirmasi oleh berbagai informan: "*Saya memilih kepala desa ini karena masih keluarga dari pihak abang, sepupuh dengan suami juga*" (M1), dan "*[Desa] ini keluarga besar semua, masih ada sangkut pautnya jadi agak mungkin dia memilih yang lain*" (KDus 1). Narasi yang dikonfirmasi melalui triangulasi sumber ini menegaskan bahwa kekerabatan bukan sekadar latar sosial yang pasif, melainkan mekanisme aktif pembentuk *dyadic relationship*. Temuan ini sejalan dengan pandangan Putnam (1993) yang menyatakan bahwa dalam masyarakat dengan ikatan komunitas sipil yang belum sepenuhnya berkembang, keluarga tampil sebagai institusi sosial utama yang menjadi tumpuan kepercayaan dan solidaritas bersama.

Kedua, hubungan patron ekonomi yang tercipta dari relasi agraria yang timpang. Kepala desa terpilih, yang juga merupakan pelaku ekonomi lokal berpengaruh, telah membangun "cadangan kepatuhan" (*savings of deference and compliance*) sebagaimana diistilahkan Scott (1972). Seorang warga memberikan kesaksian tentang bagaimana dependensi ekonomi dikonversi menjadi tekanan elektoral yang nyata: "*...sawah yang saya bawa sekarang ini familynya yang punya... Datang orang itu: pilih pasir atau sawah... Jam 8 memilih jam 7 pagi- pagi sudah kemari dia minta fotokan sebagai bukti*" (M2). Frasa "pilih pasir atau sawah" dan permintaan dokumentasi surat suara menunjukkan bahwa relasi ekonomi yang tampak netral telah bergeser menjadi

mekanisme pengawasan dan pemaksaan kepatuhan elektoral, menegaskan karakter hierarkis dan bersyarat dari klientelisme.

Ketiga, kedekatan dalam organisasi sosial seperti majelis taklim, kelompok tani, dan kegiatan adat. Keterlibatan aktif kandidat selama bertahun-tahun dalam organisasi-organisasi ini merupakan sebuah investasi relasional jangka panjang. Seorang warga menyatakan, *“Beliau aktif di masyarakat dari dulu, kegiatan masjid, pengajian malam jumat... Jadi wajar kalau banyak yang dukung. Sudah kenal lama, sudah sering kerja sama”* (M3). Scott (1972) menegaskan bahwa kluster patron-klien adalah cara bagi individu yang bukan kerabat dekat untuk menjalin keterikatan. Rekam jejak ini menjadi bukti kedekatan personal yang secara signifikan membedakan kandidat petahana dari para pesaingnya.

2. *Contingency* (Pertukaran Bersyarat)

Elemen *contingency* merujuk pada sifat pertukaran yang bersyarat dan timbal balik, yang membedakan klientelisme dari distribusi barang publik universal. Penelitian ini menemukan tiga bentuk dominan.

Pertama, pemberian uang yang beroperasi secara tertutup. Meskipun tidak ada informan yang mengakuinya secara langsung, eksistensi politik uang terkonfirmasi melalui tindakan antisipatif tim sukses yang berjaga semalam suntuk untuk mencegah “serangan fajar” dari pihak lawan: *“Anggota dari sana kami pantau mana tau kesini... kami jalan-jalan pakai mobil... kalau sudah aman baru kami tidur”* (Tim Sukses). Tindakan ini secara tidak langsung mengakui bahwa politik uang merupakan bagian yang diantisipasi secara serius dalam ekosistem kompetisi elektoral desa.

Kedua, distribusi bantuan sosial yang bersifat selektif. Program seperti BLT Dana Desa, bantuan bibit, dan bedah rumah, yang secara formal merupakan program penanggulangan kemiskinan, didistribusikan dengan logika kalkulasi elektoral. Seorang warga menyatakan, *“Dia minta untuk dipilih... Dia ada perjanjian sama saya kalau ada rumah rehab dikasihnya”* (M4). Persepsi bahwa bantuan hanya mengalir ke jaringan keluarga kepala desa juga mencuat: *“Kalau sekarang bantuan terserah dia kalau ada bansos familynya yang dikasihnya”* (M2). Praktik ini merupakan contoh dari patronase birokrasi yang disoroti oleh Habibi (2021), di mana akses terhadap sumber daya negara didistribusikan secara diskresioner untuk keuntungan politik, bukan berdasarkan kebutuhan objektif, sehingga mengaburkan batas antara kebijakan publik dan kepentingan elektoral pribadi.

Ketiga, janji jabatan yang termanifestasi melalui ketergantungan struktural aparat desa. Meskipun rekrutmen formal melibatkan kecamatan, masa jabatan dan perpanjangan kontrak perangkat desa seperti kepala dusun sangat bergantung pada kepala desa: *“...tergantung dari kepala desa... Desa yang perpanjang masa jabatan”* (KDus 3). Kondisi ini menciptakan asimetri kekuasaan yang menempatkan aparat desa dalam posisi subordinat yang rentan terhadap mobilisasi politik. Kekhawatiran ini juga disuarakan oleh Ketua Pemuda yang mendorong rekrutmen panitia Pilkades secara terbuka: *“Karena dia kan petahana, bisa mengatur lah... untuk menghindari pandangan dari masyarakat yang tidak bagus”* (Ketua Pemuda).

3. *Hierarchy* (Hierarki)

Elemen ini menunjuk pada asimetri posisi antara patron dan klien yang memungkinkan relasi klientelistik terbentuk. Asimetri ini berwujud dalam dua hal.

Pertama, ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kandidat kepala desa berasal dari keluarga kaya dengan jaringan donatur yang kuat, sebuah kapasitas yang tidak dimiliki oleh pemilih biasa: *“Mencalonkan itu karena dorongan keluarga besar... dibantu kerabat, kawan-kawan, pendukung, tim sukses dan dibantu donatur-donatur juga”* (Kepala Desa).

Kedua, posisi dalam struktur elit lokal. Status petahana memberikan keunggulan hierarkis ganda. Secara instrumental, ia memiliki kontrol atas sumber daya komunal yang dapat digunakan untuk memperluas jaringan klien (Scott, 1972). Secara kultural, ia menikmati legitimasi sebagai “putra daerah” yang sesungguhnya: *“[Desa] ini kan satu rumpun... yang penting masih ada kandidat yang betul-betul putra-putri [desa] yang menjadi calon”* (BPD). Dengan demikian,

hierarki dalam Pilkades ini merupakan perpaduan kompleks antara ketimpangan ekonomi, kekuasaan jabatan, dan legitimasi identitas kultural yang saling memperkuat untuk menempatkan kandidat petahana pada posisi yang nyaris tak tertandingi. Akumulasi modal ini mengonfirmasi pola yang lebih luas di Indonesia, di mana klientelisme cenderung tinggi di wilayah-wilayah yang kontrol ekonominya terkonsentrasi pada elit lokal (Berenschot, 2018).

4. *Iteration* (Keberlanjutan)

Elemen iteration adalah sifat relasi yang berulang dan berkelanjutan, melampaui satu siklus pemilihan. Inilah yang membedakan klientelisme dari politik uang transaksional sesaat. Iterasi terjadi dalam dua momen temporal.

Sebelum Pilkades, kandidat secara konsisten hadir dalam hajatan warga dan memberikan bantuan personal: *"Baik orangnya sering bantu masyarakat jauh sebelum ada Pilkades... Kalau butuh surat-surat atau tanda tangan kita bisa telepon aja... Orang-orang sudah tahu mau pilih siapa"* (Tim Sukses). Rekam jejak pembangunan fisik dan program pertanian pada periode sebelumnya menjadi bukti konkret yang memperkuat ekspektasi akan keuntungan di masa depan (KDus 3).

Setelah Pilkades, relasi tetap diupayakan meskipun ada kendala struktural. Kepala desa mengakui bahwa pemangkasan Dana Desa yang drastis menghambat pemenuhan janji: *"...setelah dilantik 2026 dapat berita sudah dipangkas... Periode kemarin 1,1 M dananya menjadi 288.260.000"*. Namun, mekanisme alternatif seperti lobi ke dinas terkait tetap dilakukan untuk memenuhi permintaan konstituen (KDus 1). Temuan ini mengonfirmasi Hicken (2011) bahwa iteration menjadikan klientelisme sebagai sistem yang self-reinforcing. Distribusi manfaat selektif pasca-pemilihan menjadi "pelajaran kolektif" bahwa mendukung patron yang tepat adalah strategi bertahan hidup yang paling rasional. Dalam kondisi absennya mekanisme akuntabilitas publik yang kuat, warga belajar dari pengalaman bahwa loyalitas elektoral adalah kunci untuk mengakses sumber daya, sehingga siklus ini terus direproduksi.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Praktik Klientelisme

Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang bekerja secara sinergis dalam membentuk ekosistem klientelisme di desa ini.

1. Desentralisasi dan Penguasaan Sumber Daya Lokal

Desentralisasi pasca-reformasi, meskipun bertujuan mendekatkan pelayanan, secara paradoks telah menciptakan arena baru bagi praktik patronase. Aspinall dan Hicken (2020) menegaskan bahwa desentralisasi membuka ruang bagi elit lokal untuk menguasai dan mendistribusikan sumber daya secara selektif kepada konstituen mereka. Kondisi ini sangat terlihat dalam kasus ini. Warga yang tidak mendapatkan BLT dan bantuan perbaikan rumah menjadi sasaran mobilisasi oleh kandidat lain dengan iming-iming serupa (M5). Lebih lanjut, kewenangan kepala desa dalam urusan administratif yang vital, seperti penyelesaian sengketa surat tanah, dijadikan komoditas negosiasi elektoral (M6). Hal ini mengonfirmasi pandangan Habibi (2021) bahwa di tingkat lokal, diskresi kewenangan yang luas dan lemahnya akuntabilitas menciptakan kerawanan politik yang memfasilitasi korupsi dan klientelisme. Praktik ini menunjukkan bagaimana sumber daya negara berubah menjadi "barang pribadi" (*club goods*) yang didistribusikan untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan, sebuah ciri dari demokrasi patronase yang berpusat pada komunitas di mana partai politik lemah dan figur individu mendominasi (Berenschot & Aspinall, 2020).

2. Peran Broker sebagai Infrastruktur Sosial Klientelisme

Keberhasilan mobilisasi elektoral sangat bergantung pada peran broker. Berenschot & Aspinall (2020) menegaskan bahwa broker akar rumput lebih efektif karena kedekatan sosialnya dengan pemilih. Tim sukses di desa ini bekerja secara sistematis dengan mendatangi rumah-rumah warga, memanfaatkan ikatan keluarga dan ketetanggaan untuk menyampaikan pesan politik secara personal (Tim Sukses).

Namun, temuan yang lebih mendalam menunjukkan bahwa efektivitas mereka tidak bersumber dari penugasan kampanye formal, melainkan dari otoritas komunal yang telah dimiliki sebelumnya. Kasus seorang koordinator pengajian yang mampu mengarahkan 80 anggotanya untuk mendukung kandidat tertentu adalah bukti paling kuat. Sang koordinator menggunakan forum keagamaan yang sudah ada untuk mempertemukan kandidat dengan pemilih secara rutin: *"Karena sebelum pemilihan kami wa dia, pak kami mau yasinan ke rumah si fulan. Jadi setiap yasinan itu datang dia. Di setiap wirid itu dia tengkuh kami"*. Status "tim sukses" hanyalah label formal yang menumpang pada otoritas sosial yang sudah mengakar. Ini adalah wujud dari broker berbasis komunitas, yang berbeda dari broker transaksional "tentara bayaran" yang jamak ditemui di politik tingkat nasional (Aspinall & Hicken, 2020). Temuan ini memperkaya literatur yang ada dengan menunjukkan bahwa di tingkat desa, motivasi non-material seperti solidaritas, persahabatan, dan loyalitas organisasi seringkali menjadi pendorong utama perilaku broker (Tawakkal et al., 2020).

3. Ketergantungan Ekonomi Masyarakat

Faktor struktural yang paling fundamental adalah ketergantungan ekonomi masyarakat. Berenschot (2018) dalam *"constraint perspective"*-nya berargumen bahwa klientelisme justru subur di wilayah-wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi pada negara dan kontrol ekonomi yang terkonsentrasi, karena hal itu menekan ruang publik dan otonomi masyarakat sipil. Kondisi ini persis terjadi di desa ini. Mayoritas warga adalah petani kecil, buruh tani, dan penerima bantuan yang hidupnya bergantung pada akses terhadap lahan, program pemerintah, dan kebaikan hati sang patron. Ketergantungan ini dirawat secara konsisten oleh kepala desa jauh sebelum Pilkades, seperti yang diungkapkan oleh tim sukses: *"Baik orangnya sering bantu masyarakat... Kalau butuh surat-surat atau tanda tangan kita bisa telepon aja tidak perlu ke kantor dulu. Orang-orang sudah tahu mau pilih siapa"*. Frasa "orang-orang sudah tahu" menegaskan bahwa ketergantungan ekonomi yang terakumulasi telah mengonversi loyalitas keseharian menjadi loyalitas elektoral yang permanen. Dalam ekosistem ekonomi yang tidak beragam dan minim alternatif di luar jaringan patron, memberikan dukungan suara adalah strategi bertahan hidup yang paling rasional.

Praktik klientelisme dalam Pilkades ini merupakan hasil dari interaksi yang saling memperkuat antara tiga faktor: desentralisasi yang menyediakan sumber daya untuk didistribusikan secara selektif, jaringan broker komunitas yang memastikan distribusi tersebut efektif secara personal, dan ketergantungan ekonomi warga yang menjamin konversi sumber daya menjadi kepatuhan elektoral. Interaksi inilah yang menjelaskan mengapa klientelisme di tingkat desa bukan hanya terjadi, tetapi juga direproduksi dan dilanggengkan sebagai logika politik yang dianggap lumrah oleh warganya sendiri. Temuan ini menggarisbawahi bahwa reformasi kelembagaan saja tidak cukup untuk memberantas klientelisme tanpa adanya perubahan pada struktur sosial-politik yang melestarikannya. Studi ini juga memperkuat kesimpulan Abheseka (2019) bahwa di tingkat desa, kedekatan personal dan ikatan komunal seringkali mengalahkan keunggulan sumber daya material, karena ikatan sosial yang kuat itulah yang menjadi fondasi utama dari keseluruhan sistem klientelisme yang bekerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik klientelisme dalam Pilkades di desa ini berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan melalui empat elemen yang saling berkaitan. Relasi diadik terbentuk jauh sebelum kontestasi dimulai melalui ikatan kekerabatan, ketergantungan ekonomi terhadap lahan yang dikuasai jaringan kepala desa, dan kedekatan dalam organisasi sosial-keagamaan. Pertukaran bersyarat termanifestasi dalam politik uang yang beroperasi secara tersirat, distribusi bantuan sosial selektif berbasis kalkulasi elektoral, serta janji jabatan yang bekerja melalui ketergantungan struktural aparat desa. Hierarki patron-klien dikukuhkan oleh ketimpangan ekonomi sekaligus legitimasi kultural berbasis identitas komunal dan rekam jejak kepemimpinan petahana. Keberlanjutan relasi ini terpelihara melalui investasi sosial jangka panjang sebelum Pilkades dan distribusi manfaat pembangunan yang selektif pasca-Pilkades, sehingga menjadikan klientelisme

sebagai sistem yang terus direproduksi oleh masyarakat sendiri. Tiga faktor struktural bekerja secara sinergis memperkuat praktik ini: desentralisasi yang menempatkan kepala desa sebagai aktor sentral penguasa distribusi sumber daya lokal, peran broker berbasis komunitas yang memastikan distribusi tersebut menjangkau pemilih secara personal melalui jaringan sosial yang sudah terbangun, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pertanian dan perkebunan yang dikuasai jaringan patron. Dalam kondisi lemahnya akuntabilitas publik dan absennya alternatif kelembagaan di luar jaringan patronase, pilihan elektoral berbasis kekerabatan dan kedekatan relasional merupakan strategi bertahan hidup yang paling rasional bagi masyarakat.

Pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat regulasi yang membatasi kewenangan kepala desa petahana dalam pembentukan panitia Pilkades, perpanjangan jabatan kepala dusun, dan rekrutmen perangkat desa pada tahun pemilihan, dengan mewajibkan transparansi dan partisipasi masyarakat secara terbuka. BPD dan lembaga pengawas Pilkades harus meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang petahana selama proses pemilihan, memastikan distribusi bantuan berjalan adil, serta menyediakan saluran pengaduan yang aman bagi warga yang mengalami tekanan elektoral. Masyarakat perlu didorong untuk membangun kemandirian ekonomi melalui penguatan koperasi desa, kelompok usaha bersama, dan BUMDes yang dikelola transparan guna mengurangi ketergantungan terhadap figur patron sebagai satu-satunya sumber akses sumber daya. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan etnografi yang lebih mendalam dengan jangka waktu lebih panjang untuk mengungkap dimensi praktik klientelisme yang sulit dijangkau instrumen konvensional, khususnya mekanisme politik uang yang berlangsung secara tertutup. Studi perbandingan antardesa di wilayah kepulauan juga diperlukan untuk memperkaya pemahaman tentang variasi kondisi struktural yang memengaruhi praktik klientelisme dalam demokrasi lokal di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil, terhadap pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data serta informasi yang mendalam selama proses pengumpulan data di lapangan, yaitu Kepala Desa, anggota Badan Permasyarakatan Desa, para Kepala Dusun, Perangkat Desa, anggota Tim Sukses, Ketua Pemuda, serta masyarakat desa

DAFTAR PUSTAKA

- Abheseka, N. (2019). The Paradox of Incumbency: Patronage, Clientelism, and Incumbent Defeat in Village Chief Elections 1. *PCD Journal*, VII(2), 197–223.
- AJNN. (2025). *Terbukti Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Simeulue Divonis 2,6 Tahun Penjara*.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2020). Guns for hire and enduring machines: clientelism beyond parties in Indonesia and the Philippines. *Democratization*, 27(1), 137–156. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1590816>
- Azzahra, N. (2025). Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Journal of Political Issues*, 7(1).
- Bardhan, P. (2022). Clientelism and governance. *World Development*, 152, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105797>
- Berenschot, W. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12).
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How clientelism varies: comparing patronage democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dialeksis. (2025). *Tingkat Kasus Korupsi di Aceh Menunjukkan Angka yang Signifikan dan Menjadi Perhatian Serius*.

- Dyzenhaus, A. (2021). Patronage or policy? The politics of property rights formalization in Kenya. *World Development*, 146, 105580. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105580>
- GoodStats. (2024). *Data Terbaru Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes Tahun 2024: Jawa Timur Pimpin Desa Mandiri*.
- Habibi, M. (2021). A regional head election's political corruption and new styles of clientelism. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(4), 417. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i42021.417-430>
- Harrison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Kencana.
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14, 289–310.
- International IDEA. (2023). *Global State of Democracy Indices*.
- Kemenkeu. (2019). *Buku Pintar Dana Desa*.
- Kemenkeu. (2025). *Kajian Fiskal Regional Aceh Tahun 2024*.
- Kompas. (2025a). *10 Tahun Dana Desa, 10 Kisah Korupsi yang Membawa Nestapa*.
- Kompas. (2025b). *Siapa Saja di Balik Pusaran Korupsi Dana Desa?*
- Koran Aceh. (2024). *Dana Otsus Akan Selesai, Bagaimana Masa Depan Masyarakat Aceh?*
- Kurniawan, R. (2025). Patronage Networks and Power Disparities: The Legacy of Political Patronage in Indonesia's Governance and Democracy. *Jurnal Politik Profetik*, 13(1), 1–32. <https://doi.org/10.24252/profetik.v13i1a1>
- Lewinson, L. P. (2016). *The Impact of Pre-Registration Nurses' Spirituality Education on Clinical Practice: A Grounded Theory Investigation*. Staffordshire University.
- Mohammad, Y. (2021). *Mengurai Praktik Klientelisme di Indonesia*. LSIN.
- Muhtadi, B. (2023). *Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi*. Palgrave Macmillan.
- Pemerintah Aceh. (2025). *Kasus Korupsi di Aceh pada 2024 Didominasi Dana Desa*.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Refika Aditama.
- Tawakkal, G. T. I., Damayanti, R., Subekti, T., Alfian, F., & Garner, A. D. (2020). Social networks and brokerage behavior in Indonesian elections: Evidence from Central Java. *Asian Affairs(UK)*, 47(3), 226–243. <https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1765473>
- Tribatanews Polres Simeulue. (2023). *Kecamatan Simeulue Timur Dipilih Secara Khusus Karena Memiliki Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Terbesar di Kabupaten Simeulue*. Tribatanews Kepolisian Resor Simeulue.
- World Bank. (2021). *Village Public Expenditure Management in Indonesia: Towards Better Budgeting and Spending: Findings from a Village Public Expenditure Review*. The World Bank.